



Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah)

Yulia Sisca¹, Sarwani², Ade Adriani³

^{1,2,3}Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Received: 20 Juni 2025
Revised: 27 Juni 2025
Accepted: 01 Juli 2025

This study was conducted to determine the influence of asset management on the effectiveness of fixed asset management through the variables of fixed asset inventory, legal audit, fixed asset valuation, fixed asset optimization, and supervision and control of fixed assets. This type of research is quantitative, using purposive sampling techniques, which are limited to certain individuals who can provide the desired information and who understand and are able to provide a complete picture of fixed asset management. The unit of analysis in this research is all working units managing regional government property in 38 (thirty-eight) Regional Apparatus Organizations (SOPD) within the Province of Central Kalimantan. The working unit managing BMD will be represented by individual BMD officials, namely the User Asset Manager in each SOPD and the Head of the SOPD as the Asset User, with a total of 76 respondents. Data collection techniques utilize questionnaires, and data analysis uses multiple linear regression analysis with the analysis tool used being IBM SPSS version 25. The results of the study indicate that the variables of fixed asset inventory, fixed asset valuation, fixed asset optimization, and supervision and control of fixed assets have a negative and significant effect on the effectiveness of fixed asset management, while the legal audit variable has a positive and significant effect on the effectiveness of fixed asset management.

Keywords: *Asset Management, Asset Inventory, Fixed Asset, Fixed Asset Optimization, Fixed Asset Valuation, Legal Audit Supervision and Control of Fixed Assets, Effectiveness of Fixed Asset Management.*

(*) Corresponding Author: 2020333320014@mhs.ulm.ac.id

How to Cite: Sisca, Y., Sarwani, S., & Adriani, A. (2025). The Effect of Asset Management on the Effectiveness of Local Government Fixed Asset Management. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.B), 195-213. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10569>.

PENDAHULUAN

Pada awalnya, otonomi daerah memberikan Pemerintah Daerah (Pemda) kesempatan sekaligus tantangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, Pemda harus lebih mampu dan lebih aktif dalam mengelola daerahnya serta mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Salah satu jenis sumber daya yang dimaksud adalah aset atau Barang Milik Daerah (BMD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan “aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Aset diklasifikasikan menjadi dua yaitu aset lancar terdiri atas kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang serta persediaan dan aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Definisi BMD menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (2020) menyebutkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) sebagaimana diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan penatausahaan Pemerintah Daerah (Hadiyanti & Nahar, 2016), Pengelolaan aset adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Ini dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangannya serta dapat mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik. Pengelolaan aset tetap daerah atau Barang Milik Daerah harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku demi menciptakan pemerintahan yang *good governance* untuk mencapai pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik (Umar et al., 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan Efektivitas menurut Mardiasmo (2018) adalah cara untuk mengukur seberapa berhasil atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Doli (2020) Untuk meningkatkan aset yang dimiliki pemerintah, ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan, seperti inventarisasi aset, audit legal, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian aset. Jika tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik, ini akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambahan melalui pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Inventarisasi Aset menjadi salah satu langkah yang sangat penting dilakukan dalam pengelolaan aset daerah. Menurut Dadang (2015) inventarisasi adalah suatu kegiatan berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil setelah

dilakukan pendataan aset/barang milik daerah, sehingga diketahui jumlah, nilai dan kondisi aset yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan pengguna barang maupun yang berada dalam pengelolaan barang. Karena kegiatan ini akan berpengaruh kepada semua pengurusan, pencatatan, pemakaian, pengaturan dan pelaporan mengenai aset daerah. sehingga dengan adanya inventarisasi mampu meyakini keberadaan fisik aset tetap yang tertera pada dokumen inventaris yang sudah dilengkapi dengan aspek legalnya, ketepatan jenis, spesifikasi, dan jumlah kondisi terkini aset (baik, rusak ringan, rusak berat ataupun hilang), pendataan atas masalah yang nantinya akan muncul terkait dengan aset daerah, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, serta adanya penguasaan aset daerah oleh pihak ketiga. Serta inventarisasi menyediakan informasi nilai aset sebagai dasar penyusunan neraca awal. Dengan demikian inventarisasi diduga mampu mempengaruhi dalam mengoptimalkan pengelolaan aset tetap.

Menurut Doli (2020) Legal audit adalah bagian dari pekerjaan manajemen aset yang mencakup inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan penyelesaian masalah legal, dan rencana untuk memecahkan masalah legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset selesai karena setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus jelas status kepemilikannya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah memiliki kepemilikan yang jelas.

Penilaian aset daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Dadang (2015) penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian aset diperlukan untuk memperoleh nilai wajar dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian aset daerah dilakukan dalam rangka: pertama, penyusunan neraca pemerintah daerah; kedua, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan kelancaran optimalisasi aset tetap pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan dalam proses perencanaan dan dalam proses pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah. Salah satu cara yang efektif dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap yaitu dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dengan adanya SIMA transparansi kerja dalam pengelolaan aset terjamin tanpa perlu khawatir akan lemahnya pengawasan dan pengendalian (Sriastiti et al., 2020). Dengan demikian variabel pengawasan dan pengendalian diduga memiliki pengaruh terhadap optimalisasi aset tetap.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (2020b) menyebutkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan di turunkan ke dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2020, yang secara garis besar telah menjabarkan tentang pengelolaan aset milik daerah mulai dari perencanaan

kebutuhan sampai dengan pelaporan. Peraturan pengelolaan ini sudah memberikan gambaran serta petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai dalam mengelola aset secara baik dan benar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, tersaji di neraca nilai aset sebesar Rp 12.813.587.320.314,90 dan nilai aset tetap sebesar Rp 9.894.072.417.095,13 atau sebesar 77% dari total nilai aset, dimana nilai aset nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan aset tetap yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai yang signifikan terhadap jumlah total aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan dalam neraca, nilai ini dapat terlihat dalam tabel 1 Jumlah Aset Tetap Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1. Nilai Aset Tetap Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Jumlah Aset Tetap	Total Aset	Persentase
2017	7.999.255.845.776,90	9.995.452.217.524,94	80%
2018	8.731.830.743.441,55	11.150.190.593.749,90	78%
2019	8.512.184.608.681,85	11.697.945.573.177,80	73%
2020	8.839.803.503.816,18	11.033.816.316.776,80	80%
2021	9.894.072.417.095,13	12.813.587.320.314,90	77%

Sumber: Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Aset Tetap Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan aset tetap dapat disebabkan karena adanya mutasi aset tetap dikarenakan adanya penghapusan, hibah, maupun pengalihan status aset tetap. Dapat dilihat nilai aset tetap sebesar Rp 8.839.803.503.816,18 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 9.894.072.417.095,13. Data ini menunjukkan peningkatan aset tetap sebesar Rp 1.054.268.913.278,95 atau sebesar 12%. Rincian aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 terlihat bahwa aset yang dimiliki dan dikelola nilainya cukup besar.

Tabel 2. Rincian Nilai Aset Tetap Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020 s/d 2021

Uraian	2020	2021	Persentase Kenaikan/Penurunan
Tanah	1.942.707.809.590,03	1.973.093.479.640,03	2%
Peralatan dan Mesin	1.421.474.858.048,81	1.561.423.069.103,10	10%
Gedung dan Bangunan	2.299.087.026.371,56	2.483.591.874.643,53	8%

Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.278.901.471.182,7 9	7.978.360.668.105,5 5	10%
Aset Tetap Lainnya	167.691.287.045,72	181.119.003.316,47	8%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	353.261.624.986,76	259.333.640.176,16	-27%
Akumulasi Penyusutan	- 4.623.320.573.409,4 9	- 4.542.849.317.889,7 1	-2%
TOTAL ASET TETAP	8.839.803.503.816,1 8	9.894.072.417.095,1 3	12%

Sumber: Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Opini WTP Provinsi Kalimantan Tengah sudah diperoleh selama 7 (Tujuh) kali berturut-turut Meskipun memperoleh opini WTP selama tujuh kali berturut-turut bukan berarti aset yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lepas dari permasalahan-permasalahan terkait dengan kondisi dimana pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memadai. Serta masih terdapat rekomendasi-rekomendasi BPK dari tahun 2017-2021 yang masih belum sesuai dengan rekomendasi dan dalam proses tidak lanjut, Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah masih terdapat informasi pencatatan yang belum lengkap dan terinci pada daftar aset tetap seperti masih ada 55 data yang nilai perolehannya disajikan Rp 0,00 atau Rp 1,00 dalam kartu inventaris barang (KIB) sehingga tidak diketahui kewajaran dari nilai aset tetap tersebut, serta belum dilakukannya sensus BMD yang dikarenakan terkendala dengan anggaran SOPD terkait.

Terdapat 74 bidang tanah milik Provinsi Kalimantan Tengah yang belum tercatat pada KIB-A yang luas dan nilai perolehannya masih belum diketahui secara jelas, karena belum dilakukan penilaian aset tetap ketika serah terima Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D), membuktikan bahwa penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya efektif pengelolaan asetnya.

Berdasarkan data realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2021 dengan nilai penerimaan sebesar Rp4.485.210.000,00. dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar mengalami penurunan Rp6.156.924.892,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.079.158.312,00 atau 17,53%. Dengan Rincian nilai realisasi retribusi pemakaian kekayaan tahun anggaran 2021, sebagai berikut: Penerimaan retribusi ini diperoleh dari realisasi penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

sebesar Rp4.552.202.830,00, Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp135.209.750,00, Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp382.590.000,00, dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp7.764.000,00. Sehingga kurang maksimalnya pemanfaatan aset yang dilakukan di setiap OPD yang berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

Permasalahan lain terkait dengan legal audit serta pengawasan dan pengendalian yang telah disebutkan dalam LHP antara lain, yaitu terdapat 181 unit aset yang belum disertai surat perjanjian pinjam pakai antar lembaga/instansi, Terdapat aset tanah di bawah jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) pada Dinas PUPR yang belum dicatat sebanyak 717 aset JIJ, terdapat pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tanah dan gedung bangunan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kalimantan Selatan belum memadai, terdapat kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan pegawai, dan terdapat aset yang dikuasai oleh pihak luar Pemerintah Daerah tanpa adanya surat perjanjian pinjam pakai, sehingga dapat berpotensi disalah gunakan dan di klaim oleh pihak lain sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa peneliti sebelumnya membuktikan perbedaan hasil penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda terkait pengaruh inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap. Beberapa penelitian terdahulu terdiri dari penelitian Hartati et al (2019) dengan hasil penelitian membuktikan secara parsial maupun secara bersama-sama inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan Pratama & Pangayow (2016) membuktikan hasil penelitian inventarisasi dan penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Sedangkan penelitian Jamaludin et al (2021) menunjukkan legal Audit memiliki arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Dan penelitian Periansyah et al (2022) menunjukkan pengawasan dan pengendalian berpengaruh secara positif signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan aset.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Hartati et al (2019) dengan menambahkan variabel optimalisasi aset tetap berdasarkan penelitian Atikoh et al (2017), dengan perbedaan pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengolah data primer berupa kuesioner yang terlebih dahulu diuji validasi dan reliabilitasnya dengan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang diukur dengan menggunakan *software* IBM SPSS versi 25. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan fenomena telah diuraikan maka peneliti sangat tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui “Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap, Legal Audit, Penilaian Aset Tetap, Optimalisasi Aset Tetap, dan Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah).

METODE PENELITIAN

Jenis pada riset ini ialah kuantitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamatkan di jalan RTA Milono No. 01 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111. Diwakili oleh 38 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Provinsi Kalimantan Tengah. Populasi dalam penelitian ini seluruh unit kerja pengelola Barang Milik Daerah pada SOPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 38 SOPD. Setiap SOPD akan diwakili oleh 2 (dua) individu yang terdiri dari pengguna barang (selaku kepala SOPD/Badan) yang akan mewakili variabel dependen (Y) untuk mengukur Efektifitas Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. dan Pengurus Barang Pengguna mewakili variabel independen (X) manajemen aset yang terdiri atas inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap, sehingga diperoleh 76 responden. Teknik analisis yang digunakan ialah statistik deskriptif dan regresi berganda dengan SPSS Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inventarisasi Aset Tetap	38	41	55	48,24	3.955
Legal Audit	38	45	65	55,50	4.875
Penilaian Aset Tetap	38	26	45	40,66	3.087
Optimalisasi Aset Tetap	38	27	44	35,53	4.273
Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap	38	20	25	22,79	1.695
Efektifitas Pengelolaan Aset Tetap	38	101	125	112,16	6.223
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Diolah (2024).

Berdasarkan tabel di atas:

- 1) Nilai N atau jumlah populasi sebanyak 38 populasi yang merupakan 38 SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Variabel inventarisasi aset tetap (X1) memiliki nilai minimum sebesar 41 dan nilai maksimum sebesar 55. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 48,28 dan standar deviasi senilai 3,955, dengan nilai deviasi rendah dari nilai rata-rata, maka dapat diartikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.
- 3) Variabel legal audit (X2) memiliki nilai minimum sebesar 45 dan nilai maksimum sebesar 65. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 55,50 dan standar deviasi senilai 4,875 dengan nilai deviasi rendah dari nilai rata-rata, maka dapat diartikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.
- 4) Variabel penilaian aset tetap (X3) memiliki nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 45. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 40,66 dan

standar deviasi senilai 3,087 dengan nilai deviasi rendah dari nilai rata-rata, maka dapat diartikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.

- 5) Variabel optimalisasi aset tetap (X4) memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 44. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 35,53 dan standar deviasi senilai 4,273 dengan nilai deviasi rendah dari nilai rata-rata, maka dapat diartikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.
- 6) Variabel pengawasan dan pengendalian aset tetap (X5) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 22,79 dan standar deviasi senilai 6,223 dengan nilai deviasi rendah dari nilai rata-rata, maka dapat diartikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.
- 7) Variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 101 dan nilai maksimum sebesar 125. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 112,16 dan standar deviasi senilai 6,223 dengan 25 (dua puluh lima) butir pernyataan pada variabel ini.

Uji Validitas

Tabel 4. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	Validitas		
		r Hitung	R Tabel	Keterangan
Inventarisasi Aset Tetap	IN.1	0,722	0,320	Valid
	IN.2	0,565	0,320	Valid
	IN.3	0,699	0,320	Valid
	IN.4	0,563	0,320	Valid
	IN.5	0,679	0,320	Valid
	IN.6	0,670	0,320	Valid
	IN.7	0,542	0,320	Valid
	IN.8	0,581	0,320	Valid
	IN.9	0,563	0,320	Valid
	IN.10	0,618	0,320	Valid
	IN.11	0,587	0,320	Valid
Legal Audit	LA.1	0,632	0,320	Valid
	LA.2	0,588	0,320	Valid
	LA.3	0,707	0,320	Valid
	LA.4	0,600	0,320	Valid
	LA.5	0,728	0,320	Valid
	LA.6	0,644	0,320	Valid
	LA.7	0,559	0,320	Valid
	LA.8	0,671	0,320	Valid
	LA.9	0,697	0,320	Valid
	LA.10	0,637	0,320	Valid
	LA.11	0,537	0,320	Valid
	LA.12	0,586	0,320	Valid

	LA.13	0,470	0,320	Valid
Penilaian Aset Tetap	PE.1	0,581	0,320	Valid
	PE.2	0,570	0,320	Valid
	PE.3	0,670	0,320	Valid
	PE.4	0,601	0,320	Valid
	PE.5	0,707	0,320	Valid
	PE.6	0,791	0,320	Valid
	PE.7	0,791	0,320	Valid
	PE.8	0,784	0,320	Valid
	PE.9	0,791	0,320	Valid
Optimalisasi Aset Tetap	OP.1	0,446	0,320	Valid
	OP.2	0,724	0,320	Valid
	OP.3	0,698	0,320	Valid
	OP.4	0,739	0,320	Valid
	OP.5	0,479	0,320	Valid
	OP.6	0,450	0,320	Valid
	OP.7	0,522	0,320	Valid
	OP.8	0,433	0,320	Valid
	OP.9	0,432	0,320	Valid
Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap	PW.1	0,761	0,320	Valid
	PW.2	0,778	0,320	Valid
	PW.3	0,778	0,320	Valid
	PW.4	0,745	0,320	Valid
	PW.5	0,722	0,320	Valid
Efektifitas Pengelolaan Aset Tetap	EF.1	0,526	0,320	Valid
	EF.2	0,419	0,320	Valid
	EF.3	0,582	0,320	Valid
	EF.4	0,491	0,320	Valid
	EF.5	0,402	0,320	Valid
	EF.6	0,497	0,320	Valid
	EF.7	0,470	0,320	Valid
	EF.8	0,496	0,320	Valid
	EF.9	0,412	0,320	Valid
	EF.10	0,508	0,320	Valid
	EF.11	0,491	0,320	Valid
	EF.12	0,591	0,320	Valid
	EF.13	0,411	0,320	Valid
	EF.14	0,566	0,320	Valid
	EF.15	0,430	0,320	Valid
	EF.16	0,558	0,320	Valid
	EF.17	0,625	0,320	Valid
	EF.18	0,577	0,320	Valid
	EF.19	0,548	0,320	Valid
	EF.20	0,395	0,320	Valid
	EF.21	0,543	0,320	Valid

	EF.22	0,494	0,320	Valid
	EF.23	0,532	0,320	Valid
	EF.24	0,456	0,320	Valid
	EF.25	0,556	0,320	Valid

Sumber: Data Diolah (2024).

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Inventarisasi Aset Tetap	0,808	Reliabel
Legal Audit	0,842	Reliabel
Penilaian Aset Tetap	0,701	Reliabel
Optimalisasi Aset Tetap	0,711	Reliabel
Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap	0,811	Reliabel
Efektifitas Pengelolaan Aset Tetap	0,877	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2024).

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha masing-masing variabel seluruh variabel penelitian lebih besar dari 0,70, sehingga kuesioner yang disebarkan telah lulus uji reliabilitas.

Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		38
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0000000
	<i>Std. Deviation</i>	4,49145869
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	132
	<i>Positive</i>	085
	<i>Negative</i>	-132
<i>Tes Statistic</i>		132
<i>Asymp.Sig</i>		094 ^c

Sumber: Data Diolah (2024).

Berdasarkan tabel di atas, Diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,094 yang berarti nilainya > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai residual terdistribusi normal sehingga memenuhi syarat dalam model regresi yang baik.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistic</i>	
	Tolerance	VIF

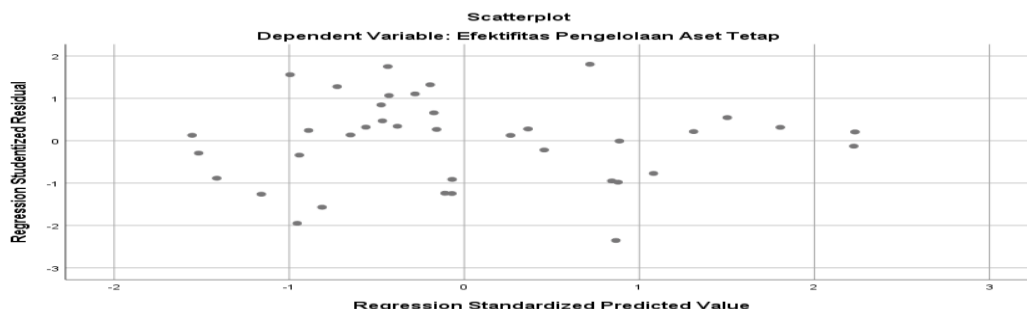
Inventarisasi Aset Tetap	0,701	1,427
Legal Audit	0,714	1,401
Penilaian Aset Tetap	0,696	1,437
Optimalisasi Aset Tetap	0,775	1,290
Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap	0,599	1,668

Sumber: Data Diolah (2024).

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai toleran pada setiap masing-masing variabel bebas adalah 0,701, 0,714, 0,696, 0,775, dan 0,599 lebih dari 0,1. Nilai VIF pada setiap masing-masing variabel bebas adalah 1,427, 1,401, 1,437, 1,290, dan 1,688 kurang dari 10, maka dari hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada seluruh variabel bebas, sehingga syarat-syarat penelitian sudah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Grafik Scatterplot



Berdasarkan gambar di atas, terlihat titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig	Keterangan
Konstan	200,024			
Inventarisasi Aset Tetap	-0,410	-2,696	0,011	Berpengaruh Signifikan
Legal Audit	0,546	4,357	0,000	Berpengaruh Signifikan
Penilaian Aset Tetap	-0,543	-2,709	0,011	Berpengaruh Signifikan

Optimalisasi Aset Tetap	-0,711	-5,492	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap	-2.241	-6,563	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah (2024).

Persamaan regresi sesuai tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 200,024 - 0,410X_1 + 0,546X_2 - 0,543X_3 - 0,711X_4 - 2,241X_5$$

Interpretasi persamaan regresi tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) menunjukkan angka sebesar 200,024 yang artinya bahwa apabila variabel inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap adalah nol, maka variabel efektifitas pengelolaan aset tetap akan bernilai 200,024.
- 2) Nilai koefisien regresi pada variabel inventarisasi aset tetap (X1) sebesar -0,410 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yaitu apabila terjadi peningkatan inventarisasi aset tetap sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada penurunan efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) sebesar -0,410.
- 3) Nilai koefisien regresi pada variabel legal audit (X2) sebesar 0,546 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yaitu apabila terjadi peningkatan legal audit sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) sebesar 0,546
- 4) Nilai koefisien regresi pada variabel penilaian aset tetap (X3) -0,543 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yaitu apabila terjadi peningkatan penilaian aset tetap sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada penurunan efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) sebesar -0,543
- 5) Nilai koefisien regresi pada variabel optimalisasi aset tetap (X4) -0,711 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yaitu apabila terjadi peningkatan optimalisasi aset tetap sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) sebesar -0,711
- 6) Nilai koefisien regresi pada variabel pengawasan dan pengendalian aset tetap (X5) -2,241 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yaitu apabila terjadi peningkatan pengawasan dan pengendalian aset tetap sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada penurunan efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) sebesar -2,241.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	882 ^a	777	742	3.159
---	------------------	-----	-----	-------

Sumber: Data Diolah (2024)

Nilai R dari model penelitian ini yaitu 0,882 atau 88,2 %. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan kemampuan dari variabel bebas yang terdiri dari variabel inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap variabel terikat efektifitas pengelolaan aset tetap (Y). Nilai yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Serta nilai *adjusted R square* sebesar 0,742 yang menunjukkan bahwa variasi turun naiknya variabel efektifitas pengelolaan aset tetap dipengaruhi oleh variabel inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian aset tetap sebesar 74,2%. Sehingga masih terdapat 25,8% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Hipotesis Parsial)

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig</i>
	<i>B</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1</i> <i>Contant</i>	200.024	12.788		15.642	.000
<i>Inventarisasi Aset Tetap</i>	-410	152	-261	-2.696	.011
<i>Legal Audit</i>	546	125	428	4.357	.000
<i>Penilaian Aset Tetap</i>	-543	201	-270	-2.709	.011
<i>Optimalisasi Aset Tetap</i>	-711	129	-494	-5.492	.000
<i>Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap</i>	-2.241	341	-657	-6.593	.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, Dapat ditarik sebuah kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Pengujian H1 pada variabel X1 terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung $-2.696 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,011 < 0,05$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka inventarisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap.
- 2) Pengujian H2 pada variabel X2 terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung $4.357 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka legal

audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap.

- 3) Pengujian H3 pada variabel X3 terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung $-2.709 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,011 < 0,05$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penilaian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap.
- 4) Pengujian H4 pada variabel optimalisasi aset tetap (X4) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) menunjukkan hasil bahwa $-5.492 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka optimalisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap.
- 5) Pengujian H5 pada variabel X5 terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung $-6.563 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis linier berganda yang menguji pengaruh variabel inventarisasi aset tetap (X1) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) diperoleh nilai t hitung $-2.696 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,011 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dapat diartikan kegiatan inventarisasi aset tetap yang selama ini dilakukan oleh pengelola aset di Pemerintah Provinsi Kalimantan tidak mempengaruhi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah salah satunya masih ada 55 data yang nilai perolehannya disajikan Rp 0,00 atau Rp 1,00 dalam kartu inventaris barang (KIB) sehingga tidak diketahui kewajaran dari nilai aset tersebut, serta belum dilakukannya sensus BMD yang dikarenakan terkendala dengan anggaran SOPD terkait. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Antoh (2017), Gaffar et al (2017), dan Pratama & Pangayow (2016) yang menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh negatif terhadap pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis linier berganda yang menguji pengaruh variabel legal audit (X1) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) diperoleh nilai t hitung $4.357 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dapat diartikan bahwa dengan sudah melakukan kegiatan legal audit/pengamanan aset tetap dalam bentuk pengendalian dan penertipan pengurusan aset tetap secara fisik, maupun administrasi dapat mengurangi risiko permasalahan hukum yang terjadi dari sengketa kepemilikan aset tetap yang belum memiliki sertifikat. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Hartati et al (2019) yang menyatakan bahwa legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset

tetap, sehingga dengan diterapkannya legal audit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis linier berganda yang menguji pengaruh variabel penilaian aset tetap (X1) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) diperoleh nilai t hitung $-2.709 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,011 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dapat diartikan bahwa dengan diterapkannya penilaian aset tetap tidak dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori stewardship, teori menyatakan bahwa steward berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap, namun karena hasil penelitian berpengaruh negatif. Arah negatif ini dipengaruhi oleh adanya permasalahan terkait dengan kegiatan penilaian aset tetap yang masih belum terselesaikan, permasalahan yang ditemui di lapangan bahwa masih terdapat 74 bidang tanah milik Provinsi Kalimantan Tengah yang belum tercatat pada KIB-A yang luas dan nilai perolehannya masih belum diketahui secara jelas, karena belum dilakukan penilaian aset ketika serah terima Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pratama & Pangayow (2016) dan Antoh (2017) yang menyatakan arah hasil penelitian mereka berpengaruh negatif, yang menunjukkan penilaian aset tetap tidak menjamin dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis linier berganda yang menguji pengaruh variabel optimalisasi aset tetap (X1) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) diperoleh nilai t hitung $-5.492 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dapat diartikan bahwa penerapan optimalisasi aset tetap tidak mempengaruhi efektifitas pengelolaan aset tetap.

Optimalisasi aset tetap merupakan kegiatan yang mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut, tanpa mengubah status kepemilikan dari aset tersebut. Arah negatif diakibatkan oleh adanya permasalahan yang terjadi pada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yaitu berdasarkan data realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan retribusi pemakaian kekayaan sebesar 17,53% atau senilai Rp1.079.158.312,00. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurang maksimalnya pemanfaatan aset yang dilakukan di setiap OPD yang berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

Hubungan teori stewardship dalam penelitian ini yaitu jika dikaitkan dengan pengertian teori ini, steward termotivasi dalam mengelola aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap, namun dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan aset atau optimalisasi aset dikarenakan bahwa tarif retribusi yang ditargetkan setiap tahun semakin tinggi, misalnya saja pada beberapa SOPD memiliki Gedung kantin yang disewakan namun tarif retribusi yang terus

meningkat setiap tahun membuat yang menyewa Gedung kantin tersebut merasa keberatan dengan tarif sewa kantin, karena tidak sesuai dengan pendapatan kantin yang diperoleh setiap bulannya, dan hal ini sehubungan dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi memberi dampak pada pendapatan kantin, sehingga ada beberapa penyewa kantin berhenti menyewa Gedung kantin tersebut. Hal ini membuat beberapa dinas yang target tarif retribusi yang ditargetkan tidak tercapai sehingga tidak maksimalnya dalam optimalisasi aset/pemanfaatan aset. Harapan beberapa SOPD pihak pengelola pemungutan retribusi bisa memikirkan solusi apa yang harus dilakukan, dan memikirkan kembali kebijakan tarif pemungutan berdasarkan dengan kondisi lapangan. Berdasarkan permasalahan ini pihak pengelola aset tetap sudah berusaha dalam meningkatkan optimalisasi aset namun, dikarenakan ada faktor lain yang membuat optimalisasi aset tetap terkendala.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atikoh et al (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap tidak dapat mempengaruhi pengelolaan aset tetap, masih terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi dalam meningkatkan pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan hasil uji t dalam analisis linier berganda yang menguji pengaruh variabel pengawasan dan pengendalian aset tetap (X1) terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap (Y) diperoleh nilai t hitung $-6.563 > t$ tabel 2.03693 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dapat diartikan bahwa dengan diterapkannya pengawasan dan pengendalian aset tetap tidak dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap.

Pengawasan dan pengendalian aset tetap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan BMD mulai dari perencanaan kebutuhan BMD sampai dengan pelaporan yang dilakukan secara periodik. Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan menilai keadaan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan dan tugas kegiatan pengelolaan barang, untuk dapat menjamin dan mengarahkan kegiatan pengelolaan aset dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Arah pengaruh yang negatif dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, adanya kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan pegawai, dan terdapat aset yang dikuasai oleh pihak luar Pemerintah Daerah tanpa adanya surat perjanjian pinjam pakai, sehingga dapat berpotensi disalah gunakan dan di klaim oleh pihak lain sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Hartati et al (2019) dan Periansyah et al (2022) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Inventarisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, dapat diartikan bahwa kegiatan inventarisasi aset tetap bukan salah satu variabel yang dapat meningkatkan

efektifitas pengelolaan aset tetap, namun variabel ini tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pengelolaan aset tetap, karena variabel ini merupakan bagian dalam siklus pengelolaan aset tetap, apabila inventarisasi aset tidak dijalankan maka akan mempengaruhi dalam jalannya pengelolaan aset tetap.

- 2) Legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, yang dapat diartikan bahwa dengan adanya kegiatan legal audit dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap
- 3) Penilaian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, yang dapat diartikan bahwa meningkatnya kegiatan penilaian aset tetap tidak menjadi jaminan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap, meskipun pengelola aset tetap sudah maksimal dalam meningkatkan penilaian aset, masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penilaian aset belum maksimal dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan aset tetap.
- 4) Optimalisasi aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap, yang dapat diartikan bahwa dengan meningkatkan optimalisasi aset tetap tidak dapat menjamin dalam efektifitas pengelolaan aset tetap, hal ini dikarenakan bahwa pengelolaan aset sudah semaksimal mungkin dalam meningkatkan optimalisasi aset tetap namun masih saja ada kendala dalam kegiatan tersebut, sehingga. Namun variabel ini tidak dapat diabaikan karena masih menjadi bagian siklus pengelolaan aset tetap.
- 5) Pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan aset tetap artinya bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap tidak menjamin dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan aset, namun variabel ini tidak dapat diabaikan karena masih menjadi bagian dalam siklus pengelolaan aset tetap, apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan atau dijalankan maka akan mempengaruhi jalannya pengelolaan aset tetap.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tesis yang telah dikerjakan terutama kepada Prof Dr Ahmad Yunani, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Dr. Wahyudin Noor, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Magister Akuntansi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bapak Dr. Sarwani, Drs, M.Si, Ak, CA, CPA selaku dosen pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Ade Adriani, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing II, Bapak Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA dan Bapak Muhammad Hudaya, SE, M.M, Ph.D, CertSF, CertDA, CSRA selaku dosen penguji yang turut memberikan banyak saran dan masukan untuk penyusunan tesis ini, Kedua Orang Tua dan Saudara saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini, seluruh Pengguna Barang selaku Kepala SOPD, dan Pengurus Barang Pengguna yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Mangkurat Banjarmasin atas ilmu dan pengalaman belajar yang telah diberikan, seluruh staf pengelola dan administrasi pada program S2 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang membantu proses administrasi, Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

REFERENCES

- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah (Studi di Kabupaten Paniai). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah (Studi di Kabupaten Paniai). *Manajemen & Bisnis*, 1.
- Atikoh, N., Febrian, E., & Hendrawan, R. (2017). Fixed Asset Management In The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12).
- Dadang, S. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. PPM.
- Doli, S. (2020). Manajemen Aset: Startegi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, I., Hasanuddin, B., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia Terhadap Optimalisasi Aset Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisis*, 6(2).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. 2.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3, 40–51.
- Jamaluddin, Natalya, & Paulina, S. (2021). Total Asset Turnover, Price Earning Ratio dan PBV terhadap Return Saham. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2016).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2020a).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2020b).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). In <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). Manajemen Barang Milik daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3081. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13>

- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.
- Sriastiti, N., Ningsih, N., & Yasa, P. (2020). Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Optimalisasi Kekayaan Negara set Di Satuan Kerja Di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar. 24–38.
- Sugiama. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Guardaya Intimarta.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Wicaksana, A. (2016). *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*.